

**PENGARUH PARTISIPASI DAN PROFESIONALISME APARAT TERHADAP  
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DESENTRALISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

**(Studi pada SKPD Kabupaten Temanggung)**

TESIS



Oleh

**PAMUDJI SANTOSO**  
**C4C006402**

**PROGRAM STUDI ILMU AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran dan profesionalisme terhadap efektivitas dengan moderasi struktur organisasi. Secara spesifik tujuan tersebut bertujuan menguji bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap efektivitas penggunaan anggaran, bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap efektivitas penggunaan anggaran, moderasi struktur organisasi pada pengaruh partisipasi anggaran terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan moderasi struktur organisasi pada pengaruh profesionalisme terhadap efektivitas penggunaan anggaran.

Populasi penelitian ini adalah Pegawai SKPD Kabupaten Temanggung yang masing-masing SKPD diambil 1 orang dari seluruh SKPD sebanyak 47, karena jumlah populasi kurang dari 100 responden, maka penelitian ini adalah penelitian sensus dengan sampel sebanyak 47 responden. Penetapan pegawai SKPD sebagai sampel dikarenakan SKPD merupakan institusi yang berwenang menyusun sekaligus menjalankan anggaran. Model penelitian ini dirumuskan dalam bentuk regresi sederhana dan *moderating regression analysis* (MRA) dengan menggunakan metode selisih mutlak. Pemilihan metode selisih mutlak didasarkan pada asumsi bahwa metode ini lebih aman terhadap kemungkinan terjadinya masalah multikolinieritas dibandingkan dengan metode interaksi.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penelitian ini membuktikan bahwa: (1) Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan anggaran, semakin tinggi partisipasi dalam penganggaran, maka semakin tinggi efektivitas penggunaan anggaran. (2) Profesionalisme berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan anggaran, semakin tinggi profesionalisme dalam penganggaran, maka semakin tinggi efektivitas penggunaan anggaran. (3) Desentralisasi tidak terbukti memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap efektivitas penggunaan anggaran, semakin tinggi profesionalisme dalam penganggaran, maka semakin tinggi efektivitas penggunaan anggaran. (4) Desentralisasi terbukti memoderasi pengaruh profesionalisme terhadap efektivitas penggunaan anggaran, semakin tinggi profesionalisme dalam penganggaran, maka semakin tinggi efektivitas penggunaan anggaran.

Kata kunci: partisipasi anggaran, profesionalisme, efektivitas penggunaan anggaran dan struktur organisasi.

## ABSTRACT

*This study aims to test the influence of participation in the budget of the effectiveness and professionalism of the organization structure of moderation. The specific goal was to test how the influence of participation budget of the effectiveness of the budget, how to influence the professionalism of the effectiveness of budget, organizational structure of moderation on the influence of participation budget of the effectiveness of budget and organizational structure of moderation on the influence of the professionalism of the effectiveness of the budget.*

*Population research is SKPD District Employees Temanggung that each 1 SKPD taken people from all over SKPD as many as 47, because a population of less than 100 respondents, the research is research with a census sample of 47 respondents. Determination SKPD employees as the sample is due SKPD institutions authorized to run at the same time preparing the budget. This research model formulated in the form of a simple regression and moderating Regression analysis (MRA) using the method of absolute difference. Absolute difference between the selection method is based on the assumption that this method is more secure against potential problems multikolinieritas compared with the method of interaction.*

*Based on the results of the analysis carried out this research proves that: (1) Participation budget positive effect of the effectiveness of the budget, the higher the participation in the budgeting, the higher the effectiveness of the budget. (2) Professionalism positive effect of the effectiveness of the budget, the high professionalism in the budgeting, the higher the effectiveness of the budget. (3) Decentralization not moderate the influence of participation in the budget of the effectiveness of the budget, the high professionalism in the budgeting, the higher the effectiveness of the budget. (4) Decentralization terbukti moderate influence professionalism of the effectiveness of the budget, the high professionalism in the budgeting, the higher the effectiveness of the budget.*

*Keywords: budget participation, professionalism, effectiveness of the use of budget and organizational structure.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan faktor kritis yang dapat mempengaruhi keefektifan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Efek-efek yang ditimbulkan oleh partisipasi secara umum adalah positif dengan mengacu pada moral, motivasi, inisiatif, kinerja, prestasi kerja, kepuasan kerja, serta sikap bawahan terhadap pekerjaan, supervisor, dan organisasi itu sendiri. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa anggaran diartikan sebagai rencana kegiatan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam sebuah organisasi, Munandar (2001:1).

Sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengawasan, anggaran mengalami perkembangan dari waktu-ke waktu. Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan sistem itu dalam pelaksanaannya. Semakin banyak dan rumit manfaat yang ingin dicapai, maka semakin banyak persyaratan yang dituntut di dalam persiapan dan penyusunannya. Persyaratan tersebut meliputi (Basri: 2003) jenis dan mutu data yang disediakan, 2) sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya yang digunakan (ekstra atau intra kompatible), 3) sikap dalam menanggapi adanya perubahan biaya dan harga dan 4) tingkat kewenangan yang diberikan pimpinan pada bawahannya (sentralisasi atau desentralisasi wewenang) untuk merubah anggaran.

Pentingnya anggaran bagi organisasi terbukti dari banyaknya penelitian dalam bidang akuntansi yang menaruh perhatian serius pada masalah partisipasi anggaran (Darlis: 2002, Zain: 2003 dan Maryana: 2004) dalam Sumarno (2005). Hal ini dikarenakan partisipasi anggaran

mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Pengaruh anggaran partisipatif pada kinerja manajerial merupakan tema yang menarik dalam penelitian akuntansi. Dalam konteks pemerintahan, penyusunan anggaran merupakan hal yang penting dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga output dari perencanaan pembangunan daerah tercapainya kegiatan pembangunan untuk kemakmuran masyarakat luas di segala bidang.

Menurut Suhartono dan Solichin (2006) penentuan kebijakan pembangunan pemerintah daerah dimulai dari perencanaan (*planning*), pemrograman (*programming*) serta diikuti dengan anggaran (*budgeting*), dan di jabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Pembangunan daerah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu masyarakat harus bersikap positif terhadap pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah, yang kemudian dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat. Peran masyarakat disini ditekankan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat setempat, khususnya sebagai informal leadernya.

Sumarto (2004) menyatakan bahwa partisipasi dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan daerah yang penting seperti perencanaan dan alokasi anggaran. Sumarto (2004) juga mengungkapkan efek dari tindakan koreksi ini semakin tinggi di daerah-daerah dimana masyarakat warganya aktif dan aturan daerah yang ada mendukung. Pelibatan warga dan organisasi masyarakat warga dalam tata pemerintahan menjadi sumber munculnya pendekatan-pendekatan dan program pembangunan yang lebih inventif dan inovatif. Pendekatan yang inovatif lebih berkembang di dalam situasi dimana pimpinan daerah dan elit setempat juga memiliki cara berpikir yang inovatif.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dapat didefinisikan bahwa proses partisipasi dapat menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi potensi konflik dengan syarat proses partisipasi dikelola secara berhati-hati. Dari pengertian tersebut, partisipasi penyusunan anggaran dalam pembangunan daerah dapat menciptakan proses pembangunan lebih terarah sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Partisipasi dalam penyusunan anggaran di SKPD merupakan faktor kritis yang dapat mempengaruhi keefektifan pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif.

Penelitian mengenai partisipasi anggaran memasukkan variabel kontekstual yang berperan dalam menjelaskan efektivitas penggunaan anggaran (Widiarsi, 2006), menyatakan bahwa profesionalisme merupakan salah satu variabel yang berperan dalam menjelaskan efektivitas penggunaan anggaran.. Profesionalisme sendiri diartikan sebagai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan pada persoalan yang umumnya dihadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut tanpa perlu mempelajari kembali secara luas dan bantuan dari pihak lain (Tugiman, 1998). Profesionalisme juga menjadi suatu pendorong motivasi dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja (Kalbers et al, 1995). Pegawai dengan tingkat profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi maupun individu (Rahmawati, 1997).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Brownell (1982), Brownell dan McInnes (1986), dan Indriantoro (1993) dalam Sumarno (2005) menemukan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Sementara hasil penelitian Milani (1975) dan Brownell dan Hirst (1986) dalam Sumarno (2005) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan diantara keduanya.

Adanya berbagai hasil penelitian yang berbeda tersebut kemungkinan disebabkan adanya faktor-faktor tertentu (*situational factor*) yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi

penyusunan anggaran dengan efektivitas anggaran. Faktor-faktor ini disebut faktor kontijensi. Faktor kontijensi ini memberikan gagasan bahwa sifat hubungan yang ada antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial mungkin berbeda antara satu situasi dengan situasi lainnya. Faktor kontijensi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor atribut psikologi individu yang meliputi *locus of control*, sikap terhadap pekerjaan dan perusahaan, serta motivasi dan faktor kontekstual organisasi yang meliputi ketidakpastian tugas, struktur organisasi, serta ketidakpastian lingkungan, Brownell (1981). Penelitian ini menggunakan variabel kontijensi struktur organisasional yang berfungsi sebagai variabel moderating dalam menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap efektivitas anggaran. Pemilihan variabel struktur organisasional didasarkan pada kenyataan bahwa otonomi daerah membawa implikasi pada pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah, sehingga proses efektivitas penggunaan anggaran sangat tergantung dengan pelimpahan wewenang yang terjadi di pemerintah daerah. Pentingnya desentralisasi bagi efektivitas penggunaan anggaran telah terbukti secara empiris dalam penelitian Govindarajan (1986) yang menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi yang tinggi merupakan bentuk yang tepat untuk menghadapi peningkatan ketidakpastian sehingga menunjang pencapaian kinerja.

Penelitian ini dilakukan di SKPD Temanggung, hal ini didasarkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2006 – 2007 yang mendapat opini wajar dengan pengecualian, yang menyatakan bahwa realisasi penggunaan anggaran di Kabupaten Temanggung belum sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran yang disusun kurang mencerminkan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Rendahnya efektivitas penggunaan anggaran ditandai dengan tingginya pengaduan masyarakat akan ketidaksesuaian anggaran dengan pelaksanaan di lapangan menjadikan efektivitas penggunaan anggaran menjadi isu penting yang selama ini terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Kualitas partisipasi anggaran dan profesionalisme personil penyusun anggaran diduga menjadi pemicu efektivitas selain pengawasan di lapangan. Namun demikian tingkat partisipasi dan profesionalisme tidak terlepas dari faktor kontijensi yang memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Untuk mengetahui apakah faktor kontijensi memiliki peran penting dalam menjelaskan pengaruh tingkat partisipasi dan profesionalisme terhadap efektivitas penggunaan anggaran, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi Aparat, profesionalisme Aparat penyusunan anggaran APBD berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran?
2. Apakah pengaruh partisipasi Aparat, profesionalisme Aparat dalam penyusunan anggaran APBD terhadap efektivitas penggunaan anggaran diperkuat oleh struktur organisasi desentralisasi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi Aparat penyusunan anggaran APBD terhadap efektivitas penggunaan anggaran.

2. Untuk menganalisis pengaruh profesionalisme Aparat dalam penyusunan anggaran APBD terhadap efektivitas penggunaan anggaran.
3. Untuk menganalisis apakah pengaruh partisipasi Aparat penyusunan anggaran APBD terhadap efektivitas penggunaan anggaran diperkuat oleh struktur organisasi desentralisasi.
4. Untuk menganalisis apakah pengaruh profesionalisme Aparat dalam penyusunan anggaran APBD terhadap efektivitas penggunaan anggaran diperkuat oleh struktur organisasi desentralisasi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan Akuntansi Sektor Publik pada umumnya dan Ilmu Keuangan Negara dan Daerah pada khususnya.
- b. Pemerintah Daerah sebagai gambaran untuk meningkatkan kemampuan unit kerja dalam penyusunan anggaran berdasarkan skala prioritas anggaran daerah untuk dapat mencapai sasaran dan diterima atau di nikmati oleh masyarakat sehingga tercipta efektivitas dalam penggunaan anggaran.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Didalam penulisan penelitian ini tahapan pelaksanaan penulisan adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, yaitu teori-teori mengenai konsep tentang penganggaran, manfaat dan fungsi penganggaran, proses penganggaran, prinsip penyusunan anggaran, konsep mengenai efektivitas penggunaan anggaran, partisipasi, partisipasi penyusunan anggaran, manfaat partisipasi anggaran, profesionalisme, struktur organisasional, review penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pikir penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian dipaparkan populasi, sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

## **BAB IV : ANALISIS DATA**

Dalam bab IV disampaikan hasil analisis data yang meliputi uji deskriptif, uji instrumen, uji hipotesis serta pembahasan.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab V disampaikan kesimpulan, implikasi manajerial, keterbatasan serta saran.